

TESIS

**ANALISIS KINERJA
PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**AN ANALYSIS OF AGRICULTURAL INFORMATION
DISSEMINATOR'S PERFORMANCE
IN TANA TORAJA REGENCY**

SUDIRMAN



**PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERESITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Sistem- Sistem Pertanian

disusun dan diajukan oleh

SUDIRMAN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2007

**ANALISIS KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

SUDIRMAN

Nomor pokok P0108204509

Telah di pertahankan di depan Panitia ujian Tesis

Pada Tanggal 10 Maret 2007

Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Prof. DR.Ir.H.M.Syawal S.MSc

DR. Ir.Darmawan Salman. MS

Ketua Program Studi
Sistem-sistem Pertanian

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof DR.Ir.Abd.Latief Toleng,MSc Prof. DR. dr. Abdul Razak Thaha, MSc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sudirman
No Mahasiswa : P 0108204509
Program Studi : Sistem-Sistem Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Tana Toraja, Maret 2007

Sudirman

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas seslesainya tesis ini.

Pemikiran yang melatari pokok permasalahannya muncul dari pengamatan penulis terhadap aktivitas penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Tana Toraja, yang seolah-olah telah kehilangan arah, akibat dari bentuk kelembagaannya yang tidak mencakup keseluruhan ruang lingkup sektor pertanian sehingga pada gilirannya terjadi pencitraan penurunan kinerja penyuluh di mata masyarakat Tana Toraja

Penulis bermaksud, menyumbangkan beberapa konsep pemikiran guna memperbaiki kinerja penyuluh pertanian tersebut agar dapat memperlihatkan peran yang nyata dalam pembangunan pertanian di Tana Toraja.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis, selama masa penyusunan tesis ini, yang hanya berkat rahmat Allah melalui bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat rampung sebagaimana adanya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. H. M. Syawal S, MSc. Sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Dr.Ir.Darmawan Salman, MS. Sebagai anggota Komisi Penasihat atas bantuan dan bimbingan yang diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian sampai dengan

penulisan tesis ini. Terima kasih juga, penulis sampaikan kepada para dosen pengajar pascasarjana yan telah mengalihkan pengetahuan yang dimiliki kepada penulis selama proses belajar berlangsung. Selanjutnya saya mengucapkan pula terima kasih yang tak terhingga kepada bapak J.A.Situru' SH. Selaku Bupati Tana Toraja yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam bentuk izin belajar pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Hal yang sama saya sampaikan pula kepada Ir. Petrus Nari Toding selaku Asisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja, yang telah banyak memberi dorongan untuk menjalani proses belajar ini, serta teristimewa rekan - rekan penyuluh pertanian yang telah menjadi obyek penelitian sebagai responden dan para kontak tani/ petani yang menjadi informan. Mudahah - mudahah semua kebaikan yang mereka berikan akan menjadi amal jariah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin

Tana Toraja, Maret 2007

Sudirman

ABSTRAK

SUDIRMAN, *Analisis Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Tana Toraja* (Dibimbing Oleh. H.M.Syawal S dan Darmawan Salman)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Tana Toraja, dan mengetahui besarnya kontribusi faktor-faktor kelembagaan penyuluh pertanian terhadap kinerja penyuluh di kabupaten Tana Toraja

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Tana Toraja. Sampel dipilih secara purposif dan acak 30 penyuluh pertanian sebagai responden dan 30 petani/ kontak tani sebagai informan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Data dianalisis dengan statistik linier berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel organisasi (x1) diperoleh sebesar 39,59 %, variabel SDA (x2) sebesar 58,91 %, variabel aturan dan prosedur kerja (x3) sebesar 61,22 %, dan variabel kinerja (Y) sebesar 59,90 %. Dengan demikian aspek organisasi penyuluh masih perlu ditingkatkan. Adapun kontribusi paduan kegiatan variabel organisasi terhadap kinerja penyuluhan pertanian sebesar 12,6 %; kontribusi variabel sumberdaya terhadap kinerja penyuluhan pertanian mengalami penurunan sebesar 10,9 %. dan kontribusi paduan kegiatan variabel aturan dan prosedur kerja sebesar 72,7 %, Selanjutnya bila dilihat hubungan antara variabel kinerja (Y) dengan variabel x1, x2, x3 secara bersama-sama memperlihatkan angka sebesar $R=0,766$, sedangkan koefisien determinasi R^2 memperlihatkan angka sebesar 0,58,7 ini berarti perubahan variabel (Y) disebabkan oleh variabel x1, x2, x3 secara bersama-sama sebesar 58,7 % sehingga sisanya sebesar 42,3 % disebabkan oleh faktor lain

ABSTRACT

SUDIRMAN. *An Analysis of Agricultural Information Disseminator's Performance in Tana Toraja Regency* (Supervised by **H.M.Syawal S.** and **Darmawan Salman**)

The study are devoted to describing the structure of the agricultural information disseminating agencies in Tana Toraja Regency and investigating the contribution of the institutional factors of the agency to the performance of the disseminator in the regency

The study is conducted to 15 different working areas covered by the agencies spread all over Tana Toraja Regency. The study is based on a survey conducted to sample of 30 farmers and interviews to a 30 agricultural information disseminator's.

The descriptive analysis indicates that the respondent's perception on organization variable (X1) is an average of 39.59%, which based on a 5-point rating scale, is insufficient. On natural resources (x2), their perception is 58.91%, which is sufficient. Rules and work procedure variable (x3) is 61.22% which is more sufficient, and the performance variable (Y) is 59.90% (sufficient). The result signify that the structure of the agency in Tana Toraja needs to be improved particularly on the instructor/ information disseminator organization. The result of regression test analysis concludes the contribution of combined activities of organization variable on agricultural information dissemination activities is 12.6%. This implies that the organization, which houses the instructors, deserves more attention. The contribution of the resources variable on the information dissemination activities decreases to 10.9%. The contribution of variable of rules and work procedure is 72.7%. This proves that the rules and procedure are well implemented by the instructors.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSRTACK</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pembangunan Pertanian	11
B. Kinerja	15
C. Penyuluhan	17
D. Kerangka Pikir	22
E. Hipotesis	27
F. Batasan Pengetian	27

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	A. Tempat dan Waktu	31
	B. Tipe dan Dasar Penelitian	31
	C. Populasi Sampel	31
	D. Jenis dan Sumber Data	32
	E. Metode Pengumpulan Data	33
	F. Analisis Data	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
	A. Lokasi Penelitian	37
	B. Identitas Penyuluh	41
	C. Deskripsi Rumusan Kelembagaan	43
	D. Hasil Analisis Berdasarkan Uji Regresi	83
BAB V	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Identitas Penyuluh	88
	DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Pembagian Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Tana Toraja	39
2.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Organisasi (X1)	45
3.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel SDA (X2)	67
4.	Alokasi Anggaran Penyuluhan Tahun 2001 – 2006	69
5.	Perbandingan Anggaran Penyuluhan dengan Alokasi Anggaran Penyuluhan yang langsung dibutuhkan petani berupa untuk Media /Metode Penyuluhan dan Pelatihan/Kursus Tani.	70
6.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Aturan dan Prosedur Kerja (X3)	77
7.	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja Penyuluh (Y)	82

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Gambaran Kerangka Fikir Penelitian	26
2.	Bagan Sruktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2000	47
3	Bagan Sruktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2000	50
4	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja dengan Memempatkan BPP sebagai Kantor Cabang Dinas	53
5	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Dengan Penambahan Sub Dinas Penyuluhan	55
6	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Dengan Penambahan Sub Dinas Hortikultura dan Sub Dinas Perkebunan	57
7	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Badan/Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Badan Ketahanan Pangan	60
8	Pilihan Bagan Sruktur Organisasi Badan/Kantor Penyuluhan Pertanian, Kehutanan	63

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Daftar Kuesioner	90
2.	Daftar Nama-nama Responden	95
3	Daftar Nama-nama Informan	96
4	Tabulasi Data Berdasarkan masing-masing Variabel	97
5	Rekapitulasi Tabulasi Data	98
6	Hasil Pengolahan Data Uji Regresi Dengan Menggunakan Program SPSS 12	99
7	Koefisien Taksiran Kontribusi Organisasi, Sumberdaya, serta Aturan dan Prosedur kerja (x) Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian (Y)	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era tahun 1970-an muncul sebuah inovasi baru dalam pertanian khususnya di Negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yang dikenal dengan revolusi hijau. Konsep utamanya adalah mengintroduksi intensifikasi pertanian yang melibatkan penyuluh pertanian, dan tidak dipungkiri, hasilnya sangat spektakuler karena dalam waktu singkat bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian setidaknya peningkatan produktivitas padi persatuan luas yang meningkat dengan tajam. Hal tersebut ditandai dengan berhasilnya Indonesia swasembada beras pada tahun 1984 yang sebelumnya merupakan negara pengimpor beras yang sangat besar.

Akan tetapi, keberhasilan itu tidak bertahan lama karena revolusi hijau tersebut ternyata hanya bersifat *hardware* saja, tidak menyentuh aspek *software* nya. Revolusi hijau hanya menyentuh teknologi pertanian, namun tidak banyak menyentuh teknologi pengelolaan pertanian atau manajemennya.

Salah satu penemuan manusia paling besar di abad ke-20 adalah manajemen yang mengajari manusia tentang bagaimana mengelola organisasi dengan lebih efisien dan memberikan nilai tambah, namun penemuan tersebut belum dilekatkan dalam revolusi hijau, sehingga yang terjadi adalah membangun ketergantungan petani kepada produsen

pertanian modern, tanpa menjadikan mereka petani-petani modern yang efisien.

Untuk menjadikan sektor pertanian kompetitif, maka yang pertama dijadikan acuan adalah melihatnya bukan sebagai industri rumah tangga, namun sebagai industri modern yang diartikan sebagai organisasi bisnis yang harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, leading dan controlling (Sumodiningrat,2000).

Fungsi-fungsi manajemen tersebut, selanjutnya hanya akan bermanfaat bila dikelola oleh manusia yang mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa informasi yang digulirkan sekarang perlu dimulai dari pembenahan perilaku semua kalangan terutama pada segenap jajaran aparat negara dan petugas pertanian secara keseluruhan agar berpihak pada pemberdayaan masyarakat khususnya petani, selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian merupakan agenda yang cukup mendesak mengingat bahwa sektor pertanian diharapkan dapat bangkit lebih dahulu daripada sektor-sektor lainnya.

Hasil evaluasi studi Bank Dunia dalam Sumodiningrat (2000), menyebutkan bahwa :1). Peran serta petani dalam perencanaan penyuluhan pertanian sangat diperlukan, 2). Penyelenggaraan penyuluhan harus dibedakan berdasarkan spesifik lokalita, 3). Pendekatan "Top down" serta sistem penyampaian informasi penyuluhan yang lebih bersifat desentralisasi, 4). Pelayanan penyuluhan pertanian yang rumit

memerlukan waktu dalam pengembangannya, 5). Biaya penyuluhan pertanian adalah sangat penting dan dianjurkan, 6). Mata rantai riset yang cocok dengan penyuluhan serta keterlibatan petani harus diarahkan pada sistem usahatani.

Dari hasil studi tersebut diketahui beberapa titik kelemahan dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian, kelemahan tersebut antara lain :

- 1) Peran serta petani yang sangat kecil dan focus penyuluhan salah tempat,
- 2) Kelembagaan di tingkat petani tidak berfungsi dan tidak efektif,
- 3) Metode yang digunakan umumnya kadaluarsa dari biasanya, hanya menekankan alur perintah dari atas kebawah,
- 4) Pengkotakan dalam penyelenggaraan penyuluhan sehingga tampak kurangnya koordinasi antar sub sektor,
- 5) Struktur dan manajemen penyuluhan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) lemah dan tidak memadai,
- 6) Kemampuan teknis para penyuluh yang sangat terbatas dan karier para penyuluh masih tidak jelas arahnya ,
- 7) Teknis penyuluhan lemah,
- 8) Dukungan dana terhadap penyuluhan sangat kecil,
- 9) Koordinasi kebijaksanaan penyuluhan pertanian kurang jelas , dan
- 10) Kecilnya keterlibatan peran wanita tani dalam penyuluhan pertanian.

Faktor penyebab lemahnya sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian tersebut pada dasarnya disebabkan oleh bentuk kelembagaan

penyuluhan yang sering berubah-ubah dan beragam mulai dari tingkat pusat, sampai ke daerah.

Perubahan bentuk kelembagaan penyuluhan tersebut dikemukakan sebagai berikut: Pada awal Pelita pertama terbit Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimas, sebagai lembaga yang mewadahi penyuluh pertanian, ketika itu pemerintah mengangkat penyuluh pertanian secara besar-besaran sebagai konsekuensi dari program Bimas itu sendiri, pada masa tersebut pola pelaksanaan kegiatan penyuluhan baru dalam taraf mencari bentuk.

Pada Tahun 1976 terbit keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 223/Kpts/Um/1976 dan No 76 Tahun 1976 tentang pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bertugas menyelenggarakan program dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian terhadap petani menuju cara bertani yang baik, usahatani yang lebih menguntungkan dan hidup sejahtera, pada periode tersebut wujud penyuluhan pertanian sudah mulai nyata, walaupun kegiatan utamanya masih terfokus pada peningkatan produksi beras hal ini ditandai dengan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada Tahun 1984.

Selanjutnya pada Tahun 1985, penyelenggaraan penyuluhan berubah lagi dengan terbitnya Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No 59 Tahun 1986 / No 695/Kpts/LP.120/II/1986 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pada keputusan ini Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPP yang menjadi wadah organisasi penyuluh pertanian dilimpahkan ke Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh seorang kepala BPP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota, dengan bantuan Sekretaris Pelaksana Harian Bimas, Kepala BPP tersebut dibantu oleh kelompok penyuluh pertanian sebanyak lima orang yang masing-masing membidangi bidang sumberdaya pertanian, tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan, sementara ditingkat wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) ditempatkan seorang penyuluh pertanian lapangan yang bertanggung jawab kepada kepala BPP. Pada masa tersebut, penyuluh pertanian dapat diakui sebagai jabatan fungsional, hal ini ditandai dengan diterbitkannya SK MENPAN No. 73 tahun 1985 yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BAKN No 17/Kpts/L.P.410/1/1986/ No 01/SE/1986 yang mengatur tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian.

Selanjutnya pada tahun 1991 terbit keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 1991/ Nomor 539/Kpts/LP.120/7/91 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang antara lain menetapkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah unit penunjang dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian dalam rangka menunjang kegiatan penyuluhan pertanian, selain itu berfungsi pula sebagai satuan administrasi pangkal

bagi penyuluh pertanian yang berstatus pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan.

Pada masa itu pula BPP diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan dikelola oleh Dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian yang membidangi komoditas pertanian yang dominan diwilayah kedudukan BPP, dalam bentuk Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian (FKPP II)

Kemudian pada Tahun 1996 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 54 Tahun 1996/ nomor 301/Kpts/LP.120/4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dalam keputusan tersebut mengatur tentang pembentukan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) yang merupakan unit kerja organik penyuluhan pertanian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. Hubungan kerja antara BIPP dan Dinas-Dinas tingkat II lingkup pertanian adalah hubungan koordinatif, sedangkan pembinaan taktis operasional terhadap BIPP dilakukan oleh Bupati/ Walikota yang sehari-harinya dilakukan oleh Asisten II Sekwilda Tingkat II. Pada masa tersebut biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih menjadi wewenang dan tanggung jawab pusat.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang disusul dengan diterbitkannya Perda No. 16 Tahun 2000 tentang kelembagaan pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, BIPP yang menjadi lembaga penyuluhan pertanian berubah dan

hanya melekat pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai kelompok fungsional, padahal fungsi penyuluhan pertanian yang diemban penyuluh meliputi keseluruhan ruang lingkup sektor pertanian, perkebunan, peternakan termasuk perikanan, sementara disisi lain lembaga Dinas Pertanian dan Pangan hanya mencakup sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, sedangkan sub sektor hortikultura dan subsektor perkebunan melekat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Oleh karena itu penyuluh secara institusi hanya melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan sedangkan yang berkaitan dengan komoditas hortikultura dan perkebunan terabaikan. Sejak saat itulah penyelenggaraan penyuluhan kurang diperhatikan, betapa tidak, biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang selama ini masih ditanggung pusat dilimpahkan ke daerah, sebagai konsekuensi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan . Akan tetapi sangat disayangkan karena biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian terabaikan, atau kurang mendapat perhatian dalam anggaran APBD II akibatnya kinerja penyuluh kelihatannya menurun.

Indikasi penurunan kinerja penyuluh pertanian di Tana Toraja dapat dilihat dari lemahnya dampak penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian yang meliputi 1) Pembinaan petani; 2) Penerapan teknologi pertanian ditingkat petani; 3) Produktivitas komoditas pertanian yang dihasilkan petani; 4) Hubungan kerjasama petani dan kelompok tani.

Selanjutnya indikasi lain yang memperlihatkan penurunan kinerja penyuluh adalah banyaknya keluhan-keluhan masyarakat atau petani, maupun lembaga legislatif serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang sering mempertanyakan keberadaan penyuluh pertanian.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, kemudian menimbulkan pertanyaan yang saling bertentangan satu sama lain. Apakah kinerja penyuluh menurun karena kelembagaannya atau segala fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terpenuhi, ataukah sebaliknya apakah kelembagaannya atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak dipenuhi oleh Pemda Kabupaten Tana Toraja, karena penyuluh selama ini dianggap tidak memperlihatkan peran yang nyata

Akibat dari kondisi riil yang ada di kabupaten Tana Toraja tersebut, maka hal yang perlu dan mendesak untuk dilaksanakan agar dapat keluar dari polemik tersebut adalah melakukan suatu upaya atau strategi yang dapat memperbaiki kinerja penyuluh pertanian yang pada gilirannya akan memberdayakan petani dengan mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan ruang lingkup kelembagaan penyuluhan pertanian yang terdiri dari aspek organisasi, sumberdaya dan aturan/prosedur kerja yang diduga memengaruhi kinerja penyuluh dengan berpedoman pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan menerapkan fungsi manajemen secara baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja
2. Seberapa besar kontribusi faktor-faktor kelembagaan penyuluhan terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Tana Toraja

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja;
2. Mengetahui besarnya faktor-faktor kelembagaan penyuluhan yang terdiri dari organisasi, Sumber daya, serta aturan dan prosedur kerja memberikan kontribusi terhadap kinerja penyuluh penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian
2. Sebagai bahan informasi bagi pelaku kegiatan penyuluhan khususnya bagi penyuluh dan petani di Kabupaten Tana Toraja

3. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian tidak akan bisa berjalan lancar kalau tidak didukung oleh sistem penyuluhan pertanian yang baik. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya, dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan No. 16 Tahun 2006)

Mosher (1987), menyatakan bahwa ada lima syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi dalam pembangunan pertanian yakni, 1) Pemasaran hasil, 2) Penerapan teknologi, 3) Tersedianya sarana produksi, 4) Perangsang produksi bagi petani, dan 5) Pengangkutan, meskipun kelima faktor tersebut dapat dipenuhi namun masih ada faktor-faktor pelancar yang perlu mendapat perhatian bila ingin memperlancar pembangunan pertanian, salah satu diantaranya adalah pendidikan

pembangunan pertanian yang selama ini lebih dikenal dengan penyuluhan Pertanian.

Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercantum di dalam Rencana Pembangunan Pertanian 2005 - 2009 yang tertuang dalam buku Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih transparan dan bebas KKN, 2) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, 3) Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan, 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian,
- 6) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna
- 7) Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian.

Berdasarkan strategi umum tersebut selanjutnya dikemukakan beberapa kebijakan antara lain; 1) Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN, diarahkan untuk menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai disertai penerapan *reward and punishment* secara konsisten; 2) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian diarahkan untuk a). Peningkatan keterbukaan dalam perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian; b). peningkatan evaluasi, pengawasan dan pengendalian

manajemen pembangunan pertanian; c) Penyelarasan pembangunan pertanian antar sektor dan wilayah; 3).Kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan diarahkan untuk. a), peningkatan investasi swasta; b) penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan; c) kebijakan perwilayahan komoditas ; dan d) penataan sistem pewarisan lahan pertanian; 4) Kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian diarahkan untuk a). untuk menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan pertanian; b) peningkatan peran serta masyarakat; c) peningkatan kompetensi dan moral aparatur pertanian; d) penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani, dan e) pengembangan kelembagaan petani.

Block dalam Ibrahim,dkk (2003) mengemukakan bahwa setiap staf organisasi penyuluhan pertanian perlu meningkatkan sikap pelayanan (stewardship) untuk memenuhi kebutuhan petani pelanggan penyuluhan pertanian, selanjutnya Ibrahim menuliskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penyuluhan antara lain sebagai berikut.

1). Kebijakan dalam organisasi penyuluh pertanian yang mencakup a) Struktur BIPP/BPP, b) Rasio BPP/ petani, c) Gaji, d) Pangkat dan karier, e) Pendidikan, f) Pelatihan yang disediakan, g) Kejelasan tugas/ wewenang dan h) Rasio penyuluhan pertanian.

2). Prosedur metode (penyusunan program) penyuluh pertanian yang mencakup a) Identifikasi keadaan, b) Identifikasi masalah,

c) Penetapan tujuan, d) Cara mencapai tujuan. 3) Penyuluh pertanian selaku individu yang mencakup, a) Motivasi kedisiplinan. b) Umur, c) Pengalaman, d) Tingkat pendidikan, e) Pelatihan yang diikuti, f) Keahlian, g) Jenjang jabatan fungsional, h) Komitmen profesi (perilaku ideal seorang penyuluh). 4) Peran penyuluh pertanian yang mencakup; a) Produk penelitian, b) Pengalaman petani, c) Aspirasi petani, d) Program pemerintah. 5) Fasilitas penyuluh pertanian dengan cakupan; a) Kantor, b) Perlengkapan penyuluhan, c) Alat transportasi, d) Alat analisis data, dan e) Bantuan operasional.

Menurut Tulus (1995) bahwa manusia merupakan sumberdaya paling penting dalam usaha suatu organisasi mencapai keberhasilannya. Sumber daya manusia ini menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia, sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi akan tercapai. Lebih lanjut dikatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama dengan unsur lainnya seperti, bahan, modal, mesin dan teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang dan jasa dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Di bagian lain Tulus (Op.cit : 8), mempersamakan manusia dengan mesin. Mesin akan bekerja baik bila dipelihara dan dilumasi dengan baik, demikian pula halnya dengan manusia, harus terlatih dan mendapatkan penghasilan secukupnya, sehingga otomatis akan bekerja baik, ia memiliki

pemahaman yang jelas perihal peranan manajemen dan kebutuhan akan meningkatkan produktivitas namun ia tidak tahu bagaimana menggugah semangat kerja karyawan.

Kemudian Tulus (Loc.cit) berkeyakinan bahwa segala masalah manajemen pada dasarnya merupakan masalah hubungan antar manusia dan bahwa pada dasarnya manusia itu konstruktif dan kooperatif. Adalah menjadi tanggung jawab manajemen untuk mengorganisasi suatu organisasi sedemikian rupa agar orang-orang berperan sepenuh hati dalam segala kegiatannya.

B. Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Lembaga Administrasi Negara, 2003).

Selanjutnya dijelaskan ada tiga tahapan untuk mengetahui tingkatan kinerja yaitu: 1) Perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kegiatan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu, 2) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengelola masukan menjadi keluaran yang telah menjadi sasaran dan tujuan; 3) Evaluasi kinerja dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa akan datang. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa ada lima faktor yang menjadi dasar pengukuran kinerja yakni : 1) *Input*, 2) *Output*, 3) *Outcome*, 4) *Benefit*, dan 5) *Impact* (LAN , Ibid hal : 20)

Penjelasan kinerja yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara tersebut pada dasarnya seirama dengan penjelasan terdahulu, hal ini dapat dilihat dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Bila dihubungkan dengan kondisi kinerja penyuluh pertanian saat ini pada dasarnya belum dilaksanakan, karena disamping issue penilaian kinerja ini relatif baru, juga yang menjadi sasaran penilaian akuntabilitas instansi pemerintah hanyalah proyek-proyek yang dilaksanakan,

sementara yang bersifat kegiatan rutinitas tupoksi penyuluh belum dilakukan evaluasi dengan metode akuntabel. dalam arti kata model evaluasi penyuluhan yang dilakukan masih bersifat perbandingan antara rencana dan realisasi.

C. Penyuluhan

Van der Ban dan Hawkins (1999) ,mengemukakan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar dari berbagai alternative pemecahan masalah, walaupun tidak semua permasalahan dapat dipecahkan oleh penyuluhan.

Sistem penyuluhan pertanian meliputi komponen kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana serta pembiayaan yang mantap dan mendapatkan kepastian sehingga pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dapat dilaksanakan secara baik, teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya sistem pertanian selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan lengkap, tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi petani, pelaku usaha pertanian lainnya dan penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian masih dipahami secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan. (Rancangan undang-undang Sistem Penyuluhan pertanian , 2005).

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah aparat pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan secara intensif melalui kunjungan lapangan secara periodik untuk menyampaikan informasi dan membahas serta memecahkan masalah usahatani secara bersama-sama. Melalui proses kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan bersama-sama dengan petani diharapkan akan terjadi interaksi dalam menyerap teknologi baru yang berwawasan hamparan kelompok .

Wiriaatmadja (1977) ; menyatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan (belajar- mengajar) yang dalam prakteknya menggunakan cara-cara seperti peniruan, pembujukan dan propaganda dengan menghindari hal-hal yang bersifat perintah dan pemaksaan. Sementara itu Keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No19/Kep/MK.Waspan/5/1999 menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian adalah pendidikan luar sekolah dibidang pertanian yang ditujukan bagi petani nelayan dan keluarganya, serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan pertanian.

Selanjutnya Wiriaatmadja (Ibid) juga menyatakan bahwa penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk keluarga tani di pedesaan, tempat mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi

mau, tahu dan bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya secara baik dan menguntungkan serta memuaskan. Ditambahkan pula bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu pendidikan yang mengandung filsafat idealisme, pragmatisme serta realisme. Idealisme mengandung makna bahwa penyuluh harus dapat memberikan pengetahuan kepada sasaran penyuluhan sesuatu yang bernilai, dapat dipercaya dan mempunyai jangkauan masa datang. Pragmatisme mengandung arti bahwa hal tersebut dapat dikerjakan secara praktis, mudah dilaksanakan dengan belajar sambil berbuat *Learning by doing* sedangkan realisme mengandung arti penyuluhan harus mengerjakan hal-hal nyata, ilmiah dan objektif, harus sesuai dengan lingkungannya berdasarkan fakta-fakta serta kenyataan yang ada, karena petani pada umumnya baru percaya setelah melihat *Seeing is believing*.

Kemudian di bagian lain Wiriaatmadja dalam Sumodiningrat (2002), berpendapat bahwa salah satu cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan petani adalah melalui program pendampingan. Pendampingan tersebut bukanlah suatu hal yang baru, namun akhir-akhir ini istilah pendampingan petani muncul kepermukaan karena adanya berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Sejak kegiatan penyuluhan pertanian digalakkan di Indonesia, program penyuluhan dapat dianggap serupa dengan program pendampingan karena penyuluhan pertanian tinggal dan hidup diantara petani, memahami dan ikut membantu petani memecahkan persoalannya.

Ide penyuluhan ini sejalan dengan pernyataan Mosher (1978), bahwa secara eksplisit penyuluhan pada dasarnya sama dengan pendampingan, namun mempunyai perbedaan yakni, penyuluh pertanian belum tentu seorang ahli tetapi lebih tepat adalah penyampai informasi, sementara pendamping disyaratkan memiliki klasifikasi sebagai seorang ahli atau setidaknya lebih memahami persoalan daripada petani. Baik penyuluh maupun pendamping disyaratkan untuk memiliki kontak yang intens dengan petani.

Dengan demikian arti penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalah dalam usaha atau dengan kata lain bahwa penyuluhan pertanian merupakan pendidikan formal bagi petani beserta keluarganya agar mereka mau dan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai pendidikan non formal, penyuluh pertanian mempunyai potensi yang besar untuk memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat pedesaan karena terbatasnya pendidikan formal yang ada dan pada waktu yang sama dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas usahatani dalam meningkatkan standar hidup mereka.

Musgrave and Musgrave dalam Sumodiningrat (2000) menyatakan bahwa, pembinaan kepada petani dalam bentuk pendampingan penyuluhan patut dilakukan oleh pemerintah, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka sistem dan struktur pasar yang

tercipta cenderung akan bias dan tujuan memberdayakan petani sebagai stake holder utama pembangunan pertanian tidak akan tercapai.

Apabila petani tidak dilindungi dan diberikan perlakuan khusus, misalnya dalam bentuk pendampingan maka petani sebagai bagian terbesar rakyat Indonesia akan tergilas oleh sistem ekonomi yang bersaing secara sempurna. Selanjutnya Sumodiningrat (Op.cit) menyatakan pula bahwa ketidaksiapan aparatur dan prasarana serta sistem pengelolaan dalam membangun pertanian. Dicontohkan kelembagaan yang ada sekarang ini sudah seharusnya melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan petani dengan baik, namun karena keterbatasan tenaga atau sumberdaya manusia, terutama pada penyuluh pertanian yang jumlah dan mutunya rendah, mengakibatkan fungsi manajemen pemerintah tidak dapat dilakukan secara sempurna, fungsi ini makin sulit direalisasikan ketika terdapat banyak daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan rendahnya sarana komunikasi.

Lebih jauh dikatakan pula bahwa sistem pengelolaan pertanian belum tertata dengan baik dan juga dapat dikatakan tidak antisipatif terhadap perubahan-perubahan. Lebih banyaknya kegiatan proyek daripada kegiatan rutin adalah merupakan salah satu contoh, bahwa memang pengelolaan pembangunan pertanian belum berkembang. Banyak kegiatan seharusnya menjadi tugas rutin pemerintah serta lembaga dan aparat akhirnya diproyekkan (dijadikan kegiatan proyek) karena secara rutin kegiatan-kegiatan tersebut tidak berjalan. Hal ini

terjadi karena memang lembaga dan aparat yang menanganinya tidak mampu melaksanakannya yang disebabkan oleh kelemahan sistem manajemen (pengelolaan). Ketidak-siapan pengelolaan tersebut kemungkinan disebabkan belum berkembangnya sistem itu sendiri dan lemahnya antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan atau pendapat yang dikemukakan tersebut, bila dikaitkan dengan keberadaan penyuluh yang ada di Kabupaten Tana Toraja lagi-lagi memberi gambaran bahwa masih ada kesenjangan yang lebar antara misi yang diemban oleh penyuluh dan tujuan akhir dari penyuluhan itu sendiri.

D. Kerangka Pikir

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh dalam memberdayakan petani harus dilakukan upaya pendampingan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh penyuluh dengan memperhatikan keragaan kelembagaan yang terdiri dari: 1) Struktur Organisasi Penyuluh, 2) Sumber daya yang meliputi: a) Kemampuan SDM penyuluh, b) Dukungan financial, c) Teknologi dan d) Sarana penyuluhan, dan 3) Aturan dan prosedur kerja atau Tupoksi penyuluh pertanian yang meliputi: a) Persiapan Penyuluhan b) Pelaksanaan Penyuluhan c) Evaluasi Pelaporan, d) Pengembangan Penyuluh Pertanian dan e) Pengembangan Profesi

Mengapa keragaan kelembagaan penyuluh pertanian harus menjadi perhatian utama ?. Hal tersebut sangatlah beralasan karena

ketiga faktor tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian secara baik.

Berikut ini dikemukakan pemikiran yang berkait dengan ketiga faktor keragaan kelembagaan penyuluhan yang diduga memengaruhi kinerja penyuluh sebagai berikut;

1) Struktur organisasi penyuluh, seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa organisasi yang menangani penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja adalah Dinas pertanian dan Pangan yang membawahi sub sektor Tanaman pangan, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dengan demikian penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya yang berkaitan dengan sub sektor tersebut, itupun masih sebatas pada kegiatan keproyekan dengan kata lain tidak menjadi kegiatan rutinitas, sementara sub sektor hortikultura dan perkebunan berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang disatu sisi ada penyuluh kehutanan yang pada dasarnya juga tidak dapat berbuat banyak terhadap sektor hortikultura dan perkebunan.

Dengan demikian sektor perkebunan dan hortikultura tidak tersentuh oleh peran penyuluh. Oleh karena itulah organisasi yang berkaitan dengan penyuluh pertanian tersebut perlu ditata kembali,

2) Sumberdaya. Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa ada empat hal yang berkaitan dengan sumberdaya yakni a) kemampuan SDM penyuluh, yang meliputi umur, pendidikan pangkat/golongan dan lama

bertugas, b) dukungan financial, c) dukungan teknologi, dan d) dukungan sarana penyuluhan.

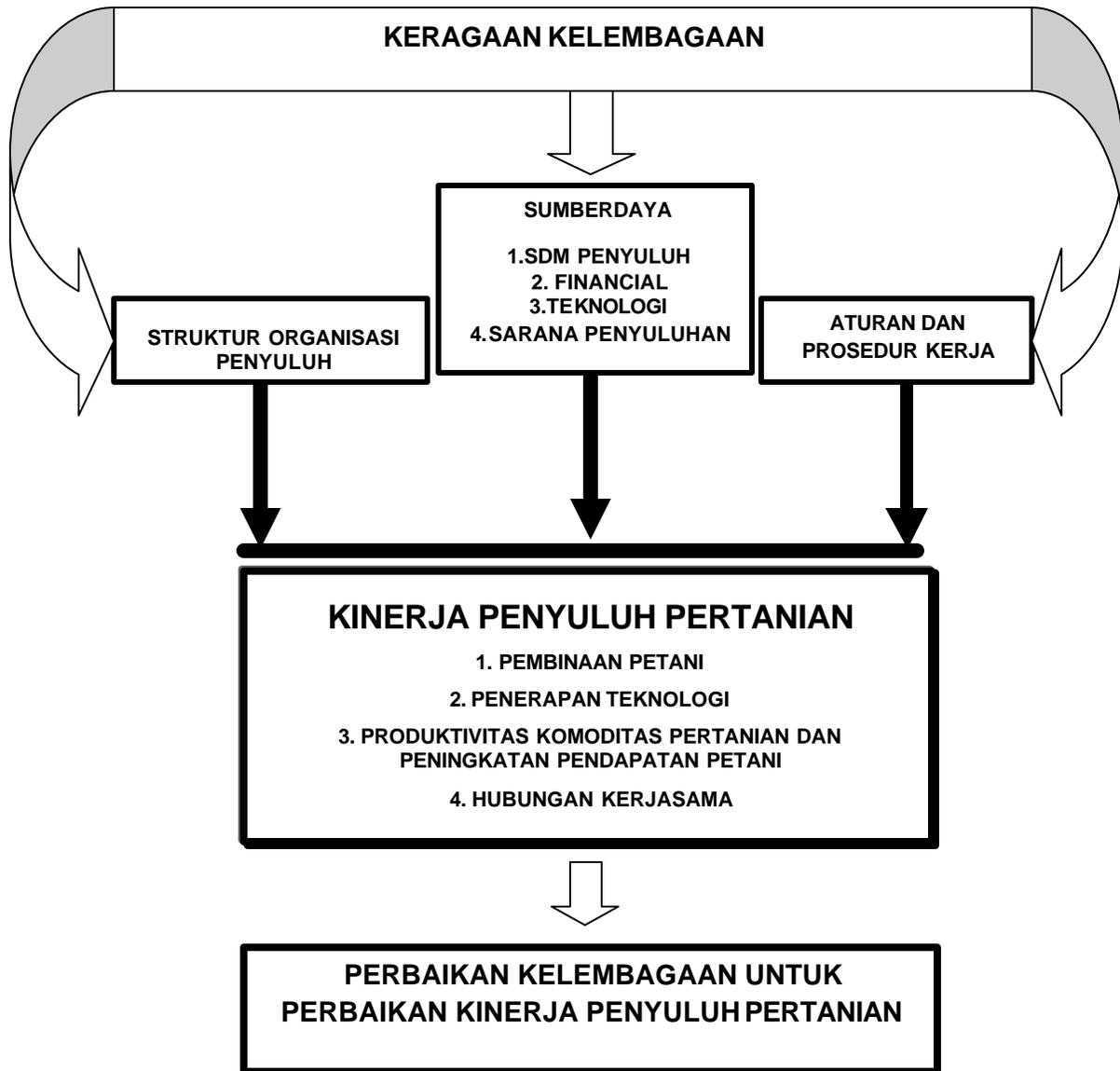
Dari keempat hal tersebut diasumsikan ada dua hal paling berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian yakni dukungan financial, dan dukungan sarana penyuluhan. Hal tersebut sangat beralasan karena penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu diperhadapkan pada sejauh mana ketersediaan financial dan sarana penyuluhan dapat dipenuhi secara proporsional . Tanpa dukungan kedua hal tersebut maka sebaik apapun penguasaan teknologi dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh penyuluh, tidak akan banyak memengaruhi perbaikan kinerja penyuluh 3) Aturan dan Prosedur kerja Penyuluh, terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan kinerja penyuluh, sesungguhnya sudah tertuang dalam tupoksi penyuluh. Di dalamnya telah diatur bagaimana tugas pokok, dan fungsi dari seorang penyuluh pertanian, apa saja yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh penyuluh, termasuk didalamnya aturan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Akan tetapi fakta berkata lain, aturan dan prosedur kerja tersebut ternyata tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya .Hal tersebut diasumsikan terjadi mungkin disebabkan oleh karena kurang terpenuhinya aspek organisasi dan aspek sumberdaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keragaan kelembagaan penyuluh pertanian yang terdiri dari organisasi penyuluh, dukungan sumberdaya dan aturan & prosedur kerja terkait satu sama lain

dan saling mendukung dalam menentukan tingkat kinerja Penyuluh Pertanian.

Apabila komponen keragaan kelembagaan penyuluh pertanian tersebut terpenuhi maka diduga akan memperbaiki penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi bahan atau alternative rumusan rekomendasi perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Tana Toraja. Kerangka pikir tersebut dikemukakan pada Gambar 1.

Gambar 1. Gambaran Kerangka Pikir Penelitian



E. HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai serta relevansi alat analisis yang digunakan maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Tana Toraja belum sesuai dengan harapan .
2. Organisasi, sumber daya, serta aturan dan prosedur kerja memberikan kontribusi positif terhadap kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Tana Toraja.

F .Batasan Pengertian

Guna menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan batasan pengertian, atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Strategi adalah suatu cara menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penerapan tugas dan fungsi penyuluh pertanian yang meliputi, perencanaan/ persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi pelaporan, pengembangan penyuluh Pertanian, dan pengembangan profesi;
- 2) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran berdasarkan hasil pengukuran eektivitas kinerja penyuluh pertanian ;

- 3) Penyuluh adalah aparat pemerintah yang ditempatkan di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) dan bertugas melakukan pendampingan dan bimbingan secara terus-menerus kepada petani dan keluarganya ;
- 4) Kelembagaan penyuluhan adalah bagian dari pranata sosial atau aturan-aturan main yang menjadi pedoman kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang terdiri dari unsur-unsur atau variabel struktur organisasi penyuluh, sumberdaya penyuluh serta aturan dan prosedur kerja
- 5) Keragaan kelembagaan adalah bentuk dan tampilan atau kondisi dari organisasi penyuluh pertanian, sumberdaya serta aturan dan prosedur kerja.
- 6) Dukungan financial adalah dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berasal dari APBD/ APBN ataupun sumber dana lainnya
- 7) Sarana Penyuluhan adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian
- 8) Aturan dan prosedur adalah metode atau cara yang digunakan dalam melaksanakan tupoksi penyuluh pertanian untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen ;
- 9) SDM penyuluh adalah kemampuan internal individu penyuluh yang dipengaruhi oleh tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap

- 10) Variabel-variabel yang diukur adalah: variabel kinerja, digunakan symbol Y, variabel organisasi penyuluh dengan symbol X1, variabel sumber daya dengan symbol x2, serta variabel aturan dan prosedur kerja menggunakan symbol x3
- 11) Responden terdiri dari koordinator penyuluh dan penyuluh pertanian pada masing-masing WKBPP
- 12) Informan adalah petani atau kontak tani yang merupakan sumber informasi yang berperan memperkuat jawaban responden pada variabel kinerja (Y). Bentuk lain dari penyajian informasi-informasi dari petani tersebut disajikan dalam bentuk cuplikan narasi-narasi yang dikemukakan langsung oleh petani atau kontak tani pada saat wawancara dilakukan
- 13) Komponen alat ukur variabel kinerja penyuluh (Y) adalah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penyuluhan pertanian terhadap petani atau kelompok tani yang meliputi pembinaan petani, penerapan teknologi, produktivitas komoditas utama pertanian, dan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait yang terdiri dari 19 item pernyataan seperti tertera dalam lampiran kuesioner
- 14) Komponen alat ukur variabel organisasi (X1) terdiri dari delapan item pernyataan seperti tertera dalam lampiran kuesioner.

- 15) Komponen alat ukur variabel Sumber daya (X2) meliputi SDM Penyuluh, Finansial, Teknologi dan Sarana Penyuluhan yang terdiri dari 13 item pernyataan seperti tertera pada lampiran kuesioner
- 16) Komponen alat ukur variabel aturan dan prosedur kerja (X3) meliputi Persiapan penyuluhan lapangan, Pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Evaluasi dan pelaporan, Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan pengembangan profesi yang terdiri dari 30 item pernyataan
- 17) Organisasi adalah lembaga yang menjadi wadah penyuluh Pertanian
- 18) WKBPP merupakan singkatan dari Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian adalah pembagian administrasi wilayah kerja penyuluh berdasarkan penempatan Balai penyuluhan pertanian, cakupan wilayahnya meliputi 2– 3 wilayah kecamatan.